

## Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Serang

Shifwa Yusriyarli<sup>1</sup>, Shifa Muhaerina,<sup>2</sup> Fatuahur Rohmah,<sup>3</sup> Syafanissa Malika Sahiro,<sup>4</sup> Dea Prastiwi Maharani,<sup>5</sup> Dinda Nazwa Aulia<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail: \* [shifwayusriyarli@gmail.com](mailto:shifwayusriyarli@gmail.com)

### Abstract

*The implementation of handling homeless people, and beggars is a form of the government's efforts to control the community on the streets. This study aims to analyze the implementation of policies for handling street children, homeless people, and beggars in Serang City based on Regional Regulation Number 2 of 2010 and Mayor Regulation Number 41 of 2017 through the Serang City Social Service as well as support and assistance from other agencies such as the Serang City Government, Satpol PP, Health Office, Education Office, Disnaker, Dukcapil, and Serang City Police. The research method used was qualitative descriptive with data collection through interviews, observations, and documentation at the Serang City Social Service and related communities. Based on the results of the research conducted, the factors that cause the emergence of street children are diverse, ranging from economic, psychological, educational, socio-cultural, and even religious. The handling of street children, homeless people and beggars in Serang City has not been optimal. The supporting factor of this policy is adequate human resources to discipline street children and collect them for data collection and coaching. Inhibiting factors such as lack of awareness of parents and street children are less interested in participating in the training provided by the Serang City Social Service. Therefore, it is necessary to optimize strict supervision, increase support for facilities and infrastructure, and educate the public regarding the problems of street children, homeless people, and beggars in Serang City.*

### Keywords:

*Implementation;  
Homelessness;  
Bum; Beggars.*

### DOI:

<https://doi.org/10.53611/z2ffsh57>

### Article Info

**Received:** June 17, 2025

**Accepted:** Februari 1, 2026

**Published:** March 29, 2026

**Copyright** © 2026 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia.

This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license

## Pendahuluan

Implementasi kebijakan merupakan hasil kerja sama antara birokrasi, pasar, dan komunitas (*iron triangle*). Nilai-nilai budaya serta gaya hidup masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah, sering memberikan pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan juga berdampak pada birokrasi, yang kemudian memengaruhi pasar dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Agar kebijakan dapat dijalankan dengan sukses, birokrasi yang bertanggung jawab harus benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat yang terdampak

oleh kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, setiap kebijakan harus siap untuk disesuaikan selama proses implementasi, karena ada kemungkinan kebijakan tertentu mendapat penolakan kuat dari masyarakat sehingga perlu dibatalkan (Utama et al., 2019).

Implementasi kebijakan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis telah dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 serta Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017. Dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis (Anjal-Gepeng) merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih dihadapi oleh berbagai daerah

di Indonesia. Keberadaan mereka di ruang-ruang publik seperti jalan raya, pinggir jalan, perempatan lampu merah, pasar, dan tempat ibadah, sering kali menimbulkan dampak sosial yang kompleks.

Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten turut menghadapi tantangan yang sama. Sebagai wilayah urban yang mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat, Kota Serang menjadi titik magnet perpindahan bagi penduduk dari desa ke kota. Akibatnya, berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya kelompok rentan, turut muncul seiring dengan dinamika perkotaan. Hal ini dapat dilihat pada data yang tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk di Provinsi Banten**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)	
	2023	2024
Pandeglang	1.312,8	1.326,0
Lebak	1.433,7	1.449,2
Tangerang	3.362,6	3.400,5
Serang	1.682,1	1.701,8
Kota Tangerang	1.950,6	1.964,0
Kota Cilegon	450,5	455,6
Kota Serang	723,8	734,9
Kota Tangerang Selatan	1.391,6	1.399,5
Banten	12.307,7	12.431,4

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2025.

Tabel diatas menunjukkan tren pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten yang terus meningkat setiap tahun, mencerminkan dinamika demografis yang signifikan. Pertambahan jumlah penduduk ini berpotensi memberikan tekanan pada berbagai sektor, seperti kebutuhan akan lapangan kerja, infrastruktur, dan layanan publik. Kenaikan penduduk di setiap kabupaten/kota menandakan adanya urbanisasi yang aktif, terutama di wilayah perkotaan yang menawarkan

peluang ekonomi lebih besar salah satunya yaitu Kota Serang.

Anak jalanan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji di tengah pesatnya pembangunan kota, sekaligus menjadi kelompok yang rentan dalam perspektif ekonomi dan ilmu sosial lainnya (Hiplunudin, 2024). Fenomena ini diperparah oleh disparitas pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan, sehingga migrasi massal ke kota tidak diimbangi dengan kemampuan kota dalam menyerap tenaga kerja. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan yang menjadi faktor utama munculnya Anjal-Gepeng. Dengan demikian, masalah Anjal-Gepeng merupakan manifestasi nyata dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan kerja serta pelayanan sosial yang memadai.

**Tabel 2. Data Peningkatan PMKS di Kota Serang**

No.	Jenis PMKS	2023		2024	
		L	P	L	P
1	Anak Jalanan	0	10	0	0
2	Pengemis	13	14	-12	-1
3	Gelandangan	33	4	-1	0
4	Anak Terlantar	-444	-709	5373	5427

Sumber: Dinas Sosial Kota Serang, 2025.

Berdasarkan data statistik Dinas Sosial Kota Serang tahun 2025, jumlah PMKS pada tahun 2023 dan 2024 mengalami perubahan yang signifikan. Jumlah anak perempuan pada tahun 2024 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dibandingkan tahun 2023. Selain itu, terdapat penurunan jumlah pengemis dan gelandangan. Namun, jumlah anak terlantar

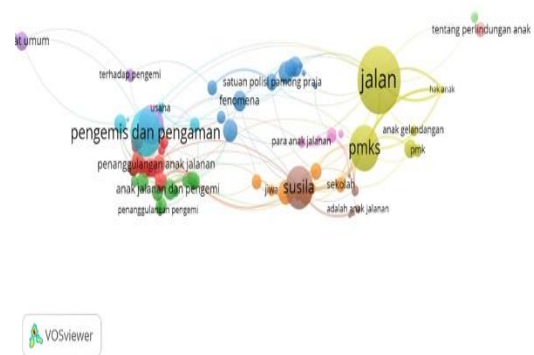
mengalami lonjakan yang signifikan, dari angka negatif pada tahun 2023 menjadi lebih dari 5.000 anak laki-laki dan perempuan pada tahun 2024. Perubahan ini dapat mengindikasikan perbaikan dalam pengumpulan data atau peningkatan kasus penelantaran anak di Kota Serang.

Keberadaan Anjal-Gepeng disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, psikologis, pendidikan, sosial budaya, bahkan agama. Anjal sering mengalami eksploitasi secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa termasuk orang tua mereka sendiri, mereka rentan terhadap kekerasan fisik, sosial, dan seksual (Stiawati et al., 2019). Permasalahan ini tidak hanya menyangkut aspek kesejahteraan sosial, tetapi juga menyangkut keteraturan, keamanan, serta estetika wilayah kota. Oleh karena itu, penanganan terhadap kelompok rentan ini menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan sosial pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Jumlah Anjal-Gepeng semakin bertambah karena berjalannya waktu dan tingginya perekonomian saat ini di Indonesia, dengan kenaikan harga bahan pokok. Mereka juga menghadapi berbagai masalah, termasuk rendahnya partisipasi pendidikan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Riana, G, 2020). Mengatasi masalah sosial memang tidak mudah dan membutuhkan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah. Namun, dalam praktiknya, koordinasi sering tidak berjalan dengan baik karena banyak pihak yang sibuk dengan kepentingan masing-masing dan belum mampu bekerja sama secara efektif (Anita & Nurmasari, 2024). Lebih lanjut, permasalahan sosial seperti ini juga erat kaitannya dengan kemiskinan struktural dan eksklusi sosial yang belum terselesaikan secara

komprehensif oleh sistem pelayanan sosial yang ada.

**Gambar 1. VOSviewer**



Sumber: Vosviewer, data diolah, 2025.

Berdasarkan visualisasi yang ditampilkan oleh VOSviewer dengan fokus pada kata kunci seperti anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, terlihat adanya pengelompokan kata kunci berdasarkan warna. Setiap warna menunjukkan tema atau topik tertentu yang saling berkaitan. Warna ungu memuat istilah seperti mengemis dan tempat umum. Klaster ini menunjukkan fokus pada aktivitas mengemis serta lokasi publik yang menjadi tempat umum bagi kegiatan tersebut terjadi.

Warna biru terdiri dari kata-kata seperti penanggulangan, fenomena, usaha, dan pengendalian. Klaster ini menggambarkan upaya-upaya penanganan, analisis terhadap fenomena sosial yang terjadi, serta bentuk intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mengatasi masalah tersebut. Warna hijau mencakup istilah seperti anak jalanan, hak anak jalanan, pengendalian, dan perlindungan anak. Klaster ini memperlihatkan perhatian terhadap aspek perlindungan hukum dan sosial bagi anak-anak yang berada di jalanan.

Warna kuning mengandung istilah seperti jalan dan tentang perlindungan anak. Klaster ini berhubungan erat dengan kondisi kehidupan anak di jalanan serta

kebijakan atau peraturan yang mendukung upaya perlindungan anak. Untuk klaster yang berhubungan dengan gelandangan, terlihat adanya kata gelandangan dan anak gelandangan. Ini menunjukkan fokus khusus pada isu gelandangan, termasuk anak-anak yang mengalami kondisi serupa.

Warna oranye mencakup istilah seperti jumlah pengemis, sekolah, dan adalah anak jalanan. Klaster ini menekankan pada aspek kuantitatif dan pendidikan, terutama dalam melihat keterkaitan antara status anak jalanan dengan akses terhadap pendidikan formal. Terakhir, warna pink mencakup kata komunitas dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Ini menunjukkan bahwa klaster ini membahas keterlibatan komunitas serta kelompok masyarakat yang tergolong miskin atau rentan secara sosial.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merujuk pada penelitian yang mengungkapkan data melalui penjelasan berupa kata-kata yang mencerminkan suatu fenomena (Sugiyono dalam Dirli et al., 2025). Penelitian kualitatif merupakan suatu proses eksplorasi terhadap berbagai fenomena sosial dan isu yang berkaitan dengan manusia (Creswell dalam Murdiyanto, 2020). Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Serang, serta melibatkan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang berada di Kota Serang, Provinsi Banten.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan analisis deskriptif terhadap data dan hasil pengamatan guna mendeskripsikan implementasi penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Serang. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan

di lapangan serta aktivitas anak jalanan di wilayah Kota Serang. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara terbuka, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang mencakup proses pengumpulan data, peringkasan data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014)

### **Hasil dan Pembahasan**

Implementasi kebijakan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Serang telah dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017. Dinas Sosial Kota Serang bertugas melakukan pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi kelompok rentan ini, bekerja sama dengan Satpol PP dalam operasi penertiban di berbagai titik kota. Meskipun kebijakan ini sudah berjalan, kendala seperti keterbatasan anggaran dan masih menghambat efektivitas pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, komitmen pemerintah Kota Serang dalam menangani masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis terlihat nyata, namun keberhasilan jangka panjang masih memerlukan dukungan anggaran yang lebih besar dan sinergi antar lembaga yang lebih optimal. Penguatan sumber daya manusia dan evaluasi berkala menjadi kunci agar intervensi sosial dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penanganan PMKS di Kota Serang dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi kelompok rentan tersebut.

**Tabel 3. Rekapitulasi Data PMKS Kota Serang**

No.	Jenis PMKS	2023		2024	
		L	P	L	P
1	Anak Jalanan	118	26	118	26
2	Pengemis	71	58	59	57
3	Gelandangan	43	20	42	20
4	Anak Terlantar	1019	1130	6392	6557

Sumber: Dinas Sosial Kota Serang, 2025.

Tabel tersebut menggambarkan perubahan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Serang pada tahun 2023 dan 2024, terdiri dari empat kategori utama, yaitu anak jalanan, pengemis, gelandangan, dan anak terlantar. Data tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki (L) dan perempuan (P). Pada jumlah anak jalanan, pengemis dan gelandangan tidak ada perubahan signifikan, perubahan paling besar terjadi pada anak terlantar dengan peningkatan angka yang naik drastis.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah ini tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat membutuhkan waktu dan diperlukan proses yang panjang untuk mengatasi masalah tersebut secara menyeluruh. Untuk merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kota Serang telah membuat berbagai kebijakan penanganan Anjal-Gepeng melalui Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, dan DP3AKB. Kebijakan ini mencakup kegiatan penjangkauan, pembinaan, hingga rehabilitasi sosial.

Pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah hambatan. Menurut Rachman (2023) kendala dalam

penanggulangan anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan yaitu besarnya rasa malas untuk belajar dan pada saat mereka kembali ke lingkungannya, Mereka kembali hidup di jalan dan berusaha mencari penghasilan dengan berbagai cara yang bisa dilakukan di tempat umum. Dengan demikian, penelitian ini akan memfokuskan kajian pada implementasi kebijakan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang, dengan melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab persoalan sosial yang ada, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975. Model tersebut mengidentifikasi enam aspek utama yang saling berinteraksi dan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Aspek-aspek tersebut meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang tersedia, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

#### **Standar dan Tujuan Kebijakan**

Menurut Van Meter and Van Horn (dalam Kasmad, 2019), standar dan tujuan kebijakan adalah pedoman atau kriteria yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan. Standar dari tujuan tersebut harus jelas, terukur, dan dapat dipahami oleh para pelaksana agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif. Dalam konteks penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Serang, permasalahan ini merupakan isu sosial yang kompleks dan memerlukan penanganan serius secara tuntas. Sebagai landasan hukum, Kota Serang telah menetapkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 41 Tahun

2017 yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Kebijakan ini secara khusus dirancang untuk menangani permasalahan anak jalanan, serta mencegah dan memberantas penyakit masyarakat yang terkait.

”Tingkat keberhasilan dapat dilihat ketika anak jalanan yang telah diberikan penanganan oleh Dinas Sosial, mereka mau melanjutkan pendidikannya.” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 10 Juni 2025 pukul 14.30 di Kantor Dinas Sosial, Kota Serang).

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan standar dan tujuan kebijakan dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis belum berjalan dengan baik, Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian pelatihan keterampilan otomotif sebagai modal dasar bagi anak jalanan untuk memasuki dunia kerja atau memulai usaha mandiri. Program pelatihan ini merupakan bagian dari strategi pemberdayaan yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan anak jalanan pada aktivitas yang merugikan.

“Kalau ada informasi razia kita nggak bisa ngapa-ngapain, jadi harus lari atau ngumpet untuk menghindari razia. Nah kecuali pengamen-pengamen yang usianya lebih tua baru ditangkep, dikasih ke dinas sosial, terus nanti dibebasin. Saat penangkapan juga dikasih pembinaan.” (Wawancara dilakukan pada Senin, 9 Juni 2025 pukul 17.25 di Pelataran Lampu Merah Ciceri, Kota Serang).

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan meskipun pelaksana kebijakan telah berupaya maksimal sesuai prosedur, standar dan tujuan, kebijakan ini belum sepenuhnya terealisasi secara efektif di lapangan. Meskipun ada razia dan pembinaan dari pihak Dinas Sosial dan Satpol PP, Anjal-Gepeng masih mampu membaca situasi dan mengelola aktivitas mereka sehingga kebijakan belum sepenuhnya mampu menghentikan fenomena tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sinergi antar instansi terkait, penguatan mekanisme pengawasan, serta pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya fokus pada tindakan, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

### **Sumber Daya**

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Menurut Van Meter and Van Horn (dalam Kasmad, 2019), sumber daya mencakup personel, dana, fasilitas, dan informasi yang tersedia untuk menjalankan kebijakan secara efektif. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, meskipun perencanaan kebijakan sudah baik, implementasi kebijakan tidak akan berjalan optimal. Dalam penelitian ini, terdapat sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan memahami tujuan kebijakan dapat menjalankan program dengan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran. Hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kota Serang menunjukkan bahwa secara umum SDM sudah berjalan dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Namun, masih diperlukan peningkatan kapasitas

dan koordinasi yang lebih baik antar instansi pelaksana agar program tidak berjalan secara parsial.

Sumber daya finansial merupakan aspek penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Sumber Daya Manusia sudah memadai secara kemampuan, tetapi ketersediaan dana dan fasilitas tidak berjalan secara maksimal. Maka hal tersebut dapat menjadi masalah baru dalam implementasi kebijakan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Ketersediaan dana yang cukup memungkinkan penyediaan fasilitas, pelatihan, dan berbagai kebutuhan operasional program. Dalam penelitian ini, dana program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh pemerintah kota, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Resty pada wawancara hari selasa 10 juni 2025 Pukul 14:30 di Dinas Sosial Kota Serang.

Dana tersebut digunakan untuk pembinaan dan pelatihan keterampilan seperti perbengkelan dan menjahit yang bertujuan memberikan bekal keterampilan kerja bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Namun, terdapat kendala dalam pemanfaatan fasilitas pelatihan, setelah mendapatkan bantuan fasilitas, alat-alat pelatihan tersebut tidak dipergunakan sebagai modal usaha. Sebaliknya, alat-alat tersebut diperjual belikan oleh peserta pelatihan, yang berpotensi menghambat tujuan pemberdayaan. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya finansial dan fasilitas.

Meskipun sumber daya sarana prasarana memadai namun tidak di tunjang dengan sumber daya yang lebih utama yaitu sumber daya manusia finansial dan sumber daya manusia maka faktor sumber daya tersebut bisa

dikatakan tidak optimal sehingga menjadikan implementasi penanganan anak jalanan juga belum optimal.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Menurut Van Meter and Van Horn (dalam Kasmad, 2019), karakteristik agen pelaksana mencakup pada kapasitas dan orientasi pelaksana kebijakan yang sangat menentukan keberhasilan implementasi. Dalam konteks penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Serang, Dinas Sosial sebagai pelaksana utama dibantu oleh instansi pendukung seperti Satpol PP dan Dinas Kesehatan. Penanganan ini dilakukan secara periodik, yaitu setiap satu tahun sekali, sebagai bagian dari program pemberdayaan dan perlindungan sosial.

Berdasarkan evaluasi, Dinas Sosial Kota Serang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal sumber daya manusia. Namun, sesuai dengan aspek karakteristik agen pelaksana menurut Van Meter dan Van Horn, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan koordinasi yang lebih baik antar instansi pelaksana. Meskipun komunikasi antar badan pelaksana telah berjalan, sinergi dan kolaborasi yang lebih erat sangat dibutuhkan agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam sikap para pelaksana menjadi faktor penting harus tetap bersemangat dan peduli terhadap kelompok sasaran agar program penanganan anak jalanan dan pengemis dapat berjalan secara efektif.

Sikap pelaksana menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi. Pelaksana yang memiliki motivasi tinggi, sikap responsif, dan peduli terhadap kelompok sasaran akan memperkuat efektivitas program penanganan anak jalanan dan pengemis. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas tidak hanya berupa peningkatan keterampilan teknis tetapi

juga pembinaan sikap dan komitmen pelaksana agar program dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

### **Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana**

Menurut Van Meter and Van Horn (dalam Kasmad, 2019), sikap atau kecenderungan para pelaksana mengacu pada komitmen, pemahaman, dan tingkat kemauan para pelaksana dalam menjalankan tugasnya terhadap kebijakan. Dinas Sosial Kota Serang dalam melaksanakan tugasnya wajib menggunakan prosedur dan menerapkan prinsip koordinasi. Para pelaksana terjun secara langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan, serta mengunjungi tempat-tempat yang sering dijadikan lokasi aktivitas anak-anak jalanan berlangsung.

Dinas Sosial memberikan pelatihan untuk anak-anak berupa pelatihan otomotif dan menjahit agar melatih keterampilan, dan memberikan fasilitas peralatan bengkel sebagai modal untuk membuka bisnis. Pelatihan dan pemberian modal ini bertujuan supaya anak-anak tidak kembali lagi ke jalanan dan dapat melakukan aktivitas bermanfaat untuk kedepannya. Sikap para pelaksana kebijakan di Kota Serang mendukung kebijakan penanganan anak jalanan dan pengemis, tetapi dalam keberhasilan implementasi masih memerlukan dengan peningkatan pemahaman, motivasi, kepedulian agar tujuan kebijakan dapat berjalan secara optimal.

### **Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Implementasi yang efektif membutuhkan komunikasi yang lancar dan koordinasi antar instansi terkait. (Van Meter and Van Horn, dalam Kasmad, 2019) Komunikasi harus juga dilakukan secara konsisten kepada para pelaksana, karena jika tidak dilakukan

secara konsisten maka Implementasi akan terhambat.

”Terkait alur komunikasi antar lembaga kami berarti dari awal itu dari pemerintah ke Dinas Sosial lalu ke Satpol PP. Gak Cuma Satpol PP aja kita tuh banyak kerjasama sama instansi kayak Dinas Kesehatan juga bisa Satpol PP bisa, DP3AKB yang bagian anak” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 10 Juni 2025 pukul 14.30 di Kantor Dinas Sosial, Kota Serang).

Hasil wawancara dan obserwasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan peran antar badan pelaksana sudah dijalankan sesuai dengan SOP setiap instansi yang terlibat seperti Satpol PP dan Dinas Kesehatan mengetahui standar dan tujuan tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga bekerja sama dengan Dinas kesehatan dan DP3AKB bagian penanganan anak jalanan. Dalam koordinasi dan komunikasi Pihak Dinas Sosial, Satpol PP dan Dinas Kesehatan sudah berjalan cukup baik, karena mereka membantu Dinas Sosial dalam pelaksanaan pembinaan berlangsung.

Kerja sama antarinstitusi dalam penanganan Anjal-Gepeng di Kota Serang menunjukkan adanya koordinasi yang kuat di antara lembaga-lembaga terkait. Setiap instansi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kewenangannya, namun tetap saling berkoordinasi dalam pelaksanaan penanganan masalah ini. Kolaborasi ini memastikan permasalahan sosial dapat ditangani secara lebih efektif dan komprehensif.

### **Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Menurut Van Meter and Vand Horn (dalam Kasmad, 2019), kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Ketersediaan sumber daya ekonomi

menjadi fondasi utama yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, kondisi sosial juga menjadi peran penting karena kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial yang ada. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor tersebut diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan tepat sasaran.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan, khususnya yang berhubungan dengan kondisi ekonomi, nilai-nilai sosial, dan dukungan politik. Kondisi sosial, ekonomi dan politik dapat membawa pengaruh dalam suatu implementasi kebijakan. Faktor internal mencakup kapasitas institusi pelaksana, sumber daya yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal mencerminkan kondisi masyarakat, dan situasi di lingkungan tempat kebijakan dijalankan.

”Tidak ada hambatan dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi karena fokus pemerintah Kota Serang salah satunya adalah menangani keberadaan Anjal-Gepeng. Masyarakat juga mendukung adanya program penanganan ini dan Dinas Sosial bersama instansi lainnya bekerja semaksimal mungkin untuk menangani masalah ini” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 10 Juni 2025 pukul 14.30 di Kantor Dinas Sosial, Kota Serang)

Hasil dari wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa fenomena anak jalanan dan pengemis di Kota Serang disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, angka putus sekolah

yang tinggi, dan ketimpangan ekonomi. Dukungan politik yang kuat serta koordinasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat telah berjalan dengan baik dalam mengoptimalkan penanganan Anjal dan Gepeng. Secara keseluruhan, kondisi sosial, ekonomi dan politik di Kota Serang dapat memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan penanganan anak jalanan dan pengemis dilakukan dengan pendekatan secara menyeluruh.

### **Kesimpulan**

Implementasi kebijakan penanganan anak jalanan dan pengemis telah dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 serta Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan berbagai instansi seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan dan DP3AKB yang berperan dalam pembinaan agar anak jalanan dapat mandiri dan kembali ke lingkungan keluarga. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan sosial yang kompleks di Kota Serang.

Implementasi kebijakan ini belum berjalan dengan baik, masih terdapat kendala yang menghambat efektivitasnya. Beberapa di antaranya adalah rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran dan fasilitas rehabilitasi. Selain itu, fenomena kembalinya Anjal-Gepeng ke jalan setelah dilakukan penertiban juga menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh akar masalah.

Pada aspek standar dan tujuan, kebijakan ini telah dirumuskan dengan baik dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program. Namun, efektivitas pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, seperti kemampuan anak jalanan untuk menghindari penertiban dan lemahnya

pengawasan terhadap fasilitas pelatihan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sinergi antar instansi dan penguatan mekanisme pengawasan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Pada aspek sumber daya manusia, Dinas Sosial dan instansi terkait telah menunjukkan komitmen dan kapasitas yang memadai dalam menjalankan program. Namun, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi serta koordinasi antar lembaga masih sangat diperlukan agar program tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kinerja sumber daya manusia juga penting untuk memastikan efektivitas kebijakan. Dengan demikian, kolaborasi yang sinergis dan penguatan kapasitas SDM diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan penanganan kelompok rentan tersebut secara optimal.

Sikap pelaksana yang peduli dan termotivasi menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan program, sehingga pembinaan sikap dan motivasi harus menjadi bagian dari strategi implementasi. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada peningkatan kapasitas SDM, koordinasi lintas sektor, pengawasan yang ketat, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

### Referensi

Anita, A., & Nurmasari, N. (2024). Pelaksanaan Koordinasi dalam Penertiban Gelandangan dan

Pengemis di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 442–462. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/16883>

Dirli, A, A. Jamaludin, U. Fitrayadi, S, D. (2025). Analisis Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Serang. *SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 2(1), 300–307.

Hiplunudin, A. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 17 Tahun 2006 tentang Peyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus Anak Jalanan di Kecamatan Ranngkasbitug). *Silatene : Jurnal Sosial Humaniora E-ISSN 2776-5385 September*, 2(2), 25–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.53611/wrw4ax39>

Kasmad, R. (2019). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttp://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBE\\_TUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttp://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE_TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)

Miles, B, M. Huberman, M, A. Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. In *SAGE Publications, Inc.* (3rd ed.). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttp://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBE\\_TUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttp://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE_TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)

- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In Yogyakarta Press. [http://www.academia.edu/download/35360663/METODE\\_PENELITIAN\\_KUALITAIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx)
- Rachman, D. T. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional*, 662–672.
- Riana, G, A. (2020). PERAN LAYANAN SOSIAL DALAM MENGELOLA ANAK JALANAN DI BANJARMASIN. *Jurnal Edukasi Dan Psikologi* :, 2507(February), 1–9.
- Stiawati, T., Rusli, B., Saefullah, A. D., & Karnesih, E. (2019). PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2). <https://doi.org/10.31506/jap.v10i2.6792>
- Utama, L. S., Effendy, K., Ngadisah, & Wildan, L. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB. *Media Bina Ilmiah*, 14(1), 1887–1902.